



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BAHRUDDIN
2. Jabatan : SEKRETARIS DEPARTEMEN PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN
3. NHK : 864143

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.925.475.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 264 m²/300 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000
2. Tanah Seluas 287 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
3. Tanah Seluas 225 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 425.475.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 478.500.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA FIT Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
2. MOTOR, HONDA MEGA PRO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000
4. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.531.030.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 5.935.005.000

**III. HUTANG****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.	10.000.000
Rp.	5.925.005.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.